

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK GKR AYU KOES INDRIYAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD RI) DAPIL JAWA TENGAH PERIODE 2014 -2019 TERHADAP KONSTITUENNYA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Wahyuning Chumaeson

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Boyolali

chumaesonwahyuning@gmail.com

ABSTRAK

Strategi komunikasi GKR Ayu Koes Indriyah kepada konstituen, Pertama, Komunikasi langsung dengan konstituen ketika melaksanakan kunjungan atau reses (Ceramah, Diskusi, dll), melakukan komunikasi dimedia cetak dan media elektronik. Kedua, Setiap kunjungan atau kegiatan reses GKR Ayu Koes Indriyah selalu menyampaikan pesan kepada konstituennya agar menjalankan perintah agama dan menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta mengingatkan pentingnya pendidikan budi pekerti serta selalu menjaga pelestarian tradisi adat budaya mereka. Ketiga, Menyampaikan tugas dan wewenang DPD RI terhadap konstituen di daerah pemilihannya.

Faktor penghambat dalam proses komunikasi politik GKR Ayu Koes Indriyah (anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah), yaitu terletak pada keterbatasan tugas dan wewenang DPD RI yang tidak sama dengan lembaga legislatif lainnya di MPR yakni DPR RI, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang lembaga DPD RI karena lembaga ini lembaga baru dalam ketatanegaraan di Indonesia, dan masih banyak masyarakat yang belum dapat memahami fungsi dan peran DPD RI. Sedangkan faktor pendukungnya adalah memanfaatkan media yang sudah ada dalam penyampaian tugas dan pokoknya sebagai anggota DPD RI, fasilitas yang cukup untuk melakukan kegiatan dengan konstituennya, memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk melakukan komunikasi politiknya.

Kata kunci : *Strategi, Komunikasi, Politik*

PENDAHULUAN

Dalam proses politik, komunikasi politik merupakan hal yang penting, terutama sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan. Komunikasi politik dimaknai sebagai prilaku atau kegiatan komunikasi melalui media massa yang bersifat politik, punya akibat politik dan berpengaruh terhadap prilaku politik. Komunikasi politik seorang tokoh harus memiliki kredibilitas dan keahlian. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-sifat seorang komunikator, sehingga sesungguhnya kredibilitas tidak melekat pada diri komunikator melainkan pada diri komunikan.

Namun demikian, kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator yang selanjutnya disebut sebagai komponen kredibilitas. Hovlad dan Wiss menjelaskan bahwa kredibilitas atau ethos itu terdiri dari dua komponen, yaitu keahlian (*experties*) dan dapat dipercaya (*trust worthiness*) oleh khalayah. Sedangkan Keahlian adalah kesan yang terbentuk pada benak khalayak tentang kemampuan politikus, aktivis atau profesional sebagai komunikator politik yang berhubungan dengan topik yang dibicarakan atau ditulis. Politikus, aktivis dan profesional yang mendapat citra diri yang baik sebagai orang yang cerdas, mampu, berakhlak, berpengalaman atau terlatih. Sebaliknya, politikus, aktivis dan profesional yang mendapat citra diri yang rendah, dipandang sebagai orang yang bodoh dan tidak

berpengalaman. (Anwar Arifin, 2011:237).

Disatu sisi sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) proses komunikasi politik yang dilakukan dapat dilihat salah satunya dari kegiatan menjaring aspirasi yang berkembang melalui beberapa cara, misalnya penyampaian aspirasi secara langsung di DPD RI, hasil pengumpulan pendapat umum, dan kunjungan ke lapangan. Meski telah menempuh berbagai cara, seringkali keputusan yang diambil oleh DPD belum mampu mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Ini mencerminkan belum efektifnya informasi yang berasal dari masyarakat sebagai sebuah masukan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan publik.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk maksud tersebut adalah mengefektifkan kegiatan anggota DPD RI selama masa reses melalui dialog- dialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat, yang tercermin dalam UU No. 17 tahun 2014 Pasal 258 disebutkan Anggota DPD RI mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan pada Pasal 258 Huruf h menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan Huruf i menyebutkan bahwa Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah yang diwakilinya.

KERANGKA TEORITIK

Pemahaman Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategia* yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *strategia* bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai awal industrialisasi (Schroder, 2008). Kemudian istilah strategi tersebut meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi, politik dan komunikasi politik. Hal itu penting dalam upaya memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum dan dalam pengambilan keputusan politik lainnya.

Dapat pula dikatakan strategi adalah suatu perencanaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau suatu rencana yang mengarah pada suatu perubahan yang sudah ditentukan. Salusu menjelaskan bahwa strategi adalah seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang *efektif* dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Sedangkan menurut Arifin strategi adalah suatu bentuk keseluruhan keputusan yang bersifat kondisional pada saat tindakan yang akan dijalankan guna untuk mencapai tujuan politik pada masa depan. (Anwar Arifin, 2003: 145). Kemudian Onong juga mengatakan bahwa strategi adalah Perencanaan (*Planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. (Effendy, 2004: 29).

Pada hakikatnya strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan masa depan. (Anwar Arifin, 2011:235-236). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa strategi merupakan suatu yang perlu dijadikan *prioritas* utama dalam melakukan tindakan yang menyangkut suatu kepentingan terhadap publik. Kemudian strategi merupakan cara untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka tujuan tidak akan mudah tercapai tanpa strategi, karena pada intinya segala tindakan dan perbuatan tidak terlepas dari strategi.

Komunikasi Politik

Komunikasi politik diasumsikan sebagai yang menjadikan sistem politik itu hidup dan dinamis. Komunikasi politik mempersembahkan semua kegiatan sistem politik, baik masa kini maupun masa lampau, sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. Kesimpulan tersebut berangkat dari suatu pemikiran bahwa komunikasi adalah suatu proses yang menyatu dengan gejala politik. (Alfian, 1993:79) Dalam definisi *Alfian* tersebut komunikasi politik bersifat fleksibel yang bergerak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, sehingga baik masa lalu, sekarang maupun akan datang politik tidak dapat dihindarkan lagi dari sistem pemerintahan. Akhirnya segenap potensi masyarakat yang memiliki sifat konstruktif terhadap pembangunan politik dapat dialihkan menjadi suatu kebijaksanaan.

Demikian pentingnya suatu komunikasi politik sebagai landasan dalam menjalankan perhelatan politik di tanah air yang berkonsep pada persatuan dan kesatuan yang utuh sebagai modal kearah pembangunan yang merata dan spritual. Sehingga keberadaan komunikasi politik bagi bangsa ini sangat dibutuhkan terutama dalam membentuk susunan tata kerja yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak menimbulkan kontradiksi ditengah-tengah masyarakat. Jadi komunikasi politik merupakan suatu proses, tindakan yang melibatkan juga pembicaraan yang bersifat inklusif yang berarti segala cara orang bertukar simbol, kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, sikap tubuh dan pikiran.

Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus merupakan keputusan strategis yang tepat bagi komunikator politik. (Anwar Arifin). Berdasarkan konsep teori strategi komunikasi politik yang didefinisikan oleh Anwar Afirin diatas, maka dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a. Ketokohan dan Kelembagaan

Langkah pertama dalam strategi komunikasi politik ialah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan seseorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam komunikasi politik. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politik yang tepat.

Ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan pesan politik, melainkan siapa tokoh politik (politikus) dan dari lembaga mana yang menyampaikan pesan politik tersebut.. Merawat ketokohan Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas (*al amin*), daya tarik, dan kekuasaan, yang oleh Rakhmat (2005) dengan menghormati Aristoteles, menyebutkan sebagai ethos. Dengan kata lain, ketokohan sama dengan ethos, yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Orang memiliki ketokohan menurut Nimmo (2000:182) dapat juga disebut sebagai pahlawan politik.

Memantapkan Kelembagaan Politik

Ketokohan seorang politikus, aktivis, atau profesional akan meningkat jika ia didukung oleh lembaga yang ternama, atau berkiprah dalam lembaga tersebut. Jadi, lembaga merupakan sebuah kekuatan yang besar dalam membantu proses komunikasi politik yang

efektif. Publik sangat menghargai lembaga yang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Justru itu, persepsi publik terhadap citra lembaga sangat ditentukan oleh kegunaan lembaga itu bagi masyarakat. Makin tinggi kegunaan lembaga itu bagi publik, maka lembaga tersebut akan semakin diperlukan oleh publik atau masyarakat.

b. Menciptakan Kebersamaan

Untuk mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara politikus dan khalayak (rakyat) dengan cara mengenal khalayak. Dalam menciptakan kebersamaan dengan masyarakat maka seorang figure politik harus melakukan hal-hal sebagai berikut ; (1) Memahami khalayak, (2) Menyusun Pesan Persuasif, (3) Menetapkan Metode, (4) Menentukan Media.

c. Membangun Konsensus

dapat dikatakan bahwa untuk membangun konsensus, harus dimulai dengan kesediaan membuka diri sehingga dapat mengembangkan seni berkompromi. Itulah salah satu strategi dasar yang perlu difahami dan dijamin bagi orang yang akan menjadi politikus atau politikus yang ingin sukses dalam melakukan komunikasi politik.

Pemahaman Konstituen

Konstituen adalah warga negara yang diwakili oleh seorang legislator yang terpilih dalam pemilu (NDI; 2008:6). Bagian dari kerja seorang legislator dalam demokrasi adalah melayani konstituen dengan mewakili kepentingan mereka dalam lembaga legislatif dan menyediakan hubungan langsung dengan pemerintah. Dapat pula dikatakan bahwa Konstituen adalah orang-orang yang merupakan pemilih/pemberi suara pada pemilihan yang berlangsung pada suatu daerah.

Konstituen adalah orang yang telah memenuhi syarat untuk ikut dalam suatu pemilihan umum yang dilakukan oleh negara dalam rangka partisipasinya terhadap negara. Yang mempunyai hak memilih dalam pemilu yaitu warga negara republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metodologi kualitatif mempunyai tujuan utama memberikan gagasan, wawasan dan pemahaman atas situasi permasalahan yang dihadapi oleh peneliti. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Data deskriptif yang ingin dihasilkan adalah data mengenai bentuk- bentuk komunikasi politik, topik agenda permasalahan pada kegiatan yang dilakukan GKR Ayu Koes Indriyah anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah. Peneliti akan melihat kinerja GKR Ayu Koes Indriyah Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukannya yang berupa partisipasi dalam bentuk dialog, serta menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

DISKUSI

Strategi Komunikasi Politik GKR Ayu Koes Indriyah.

Menurut GKR Ayu Koes Indriyah (Anggota DPD RI dapil Jawa Tengah), dalam hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2019, strategi komunikasi politik terhadap konstituen memiliki banyak cara dan metode yang dilakukan, yaitu :

Komunikasi Langsung

Dalam menampung aspirasi konstituen di provinsi Jawa Tengah GKR Ayu Koes Indriyah melakukan komunikasi langsung dengan konstituen yaitu menampung aspirasi konstituen ketika melaksanakan kegiatan reses/kunjungan ke berbagai daerah, baik itu dalam bentuk diskusi antar personal, organisasi, ceramah dan sosialisasi. GKR Ayu Koes Indriyah selalu menerima tamunya diwaktu-waktu tertentu baik itu dirumahnya maupun di kantornya. Beliau berprinsip : *“sebagai wakil rakyat saya siap ditemui oleh siapapun untuk menampung Aspirasi- aspirasi masyarakat/konstituen”*

Adapun bentuk komunikasi langsung yang dilakukan oleh GKR Ayu Koes Indriyah sebagai berikut :

Reses atau kunjungan

Reses atau kunjungan adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh GKR Ayu Koes Indriyah selaku anggota DPD RI, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menerima informasi dari konstituen/masyarakat Jawa Tengah untuk pembangunan daerah Jawa Tengah. Kegiatan reses dilakukan untuk kepentingan daerah, melaksanakan kunjungan ke pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke tingkat lurah/desa serta organisasi-organisasi masyarakat.

Kegiatan sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi adalah kegiatan menyampaikan tentang kelembagaan DPD RI, sosialisasi masalah konstitusi negara (Pancasila, UUD 1945). Kegiatan ini dilakukan berdasarkan permintaan organisasi masyarakat/pemerintah serta dapat juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan reses.

Silaturahmi dengan organisasi masyarakat.

Silaturahmi adalah kegiatan yang dilakukan oleh GKR Ayu Koes Indriyah (anggota DPD RI) baik itu secara kelembagaan ataupun personal. Secara kelembagaan misalnya menghadiri undangan acara-acara yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat lainnya. Kegiatan ini selain untuk bersilaturahmi juga untuk pendekatan dengan masyarakat

Komunikasi Media Massa

Komunikasi media massa yang dilakukan oleh GKR Ayu Koes Indriyah yaitu mensosialisasi program-program DPD RI di media massa agar masyarakat mengetahui program, fungsi dan wewenang DPD RI. Media massa yang digunakan untuk komunikasi tersebut yaitu media elektronik (RRI dan TVRI), media cetak (Suara Merdeka, Jawa Pos dll). GKR Ayu Koes Indriyah juga membuka komunikasi melalui telepon (pribadi dan kantor), email, faks.

Komunikasi Vertikal dan Horizontal

Selain melakukan komunikasi vertikal dan horizontal, GKR Ayu Koes Indriyah juga melakukan komunikasi vertikal dan horizontal secara bersamaan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jawa Tengah.

Ada hal yang menarik yang dilakukan oleh GKR Ayu Koes Indriyah, selain komunikasi vertikal dan horizontal, yaitu melakukan komunikasi dan pertemuan-pertemuan secara internasional serta perwakilan-perwakilan negara sahabat untuk memperjuangkan kepentingan Jawa Tengah dan Indonesia, disaat melakukan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri.

Pemberdayaan Staf Kantor dan Korda

Dalam melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan konstituen agar aspirasi konstituen tersebut bisa segera diselesaikan serta disampaikan dengan cepat, maka untuk mempermudah hal tersebut GKR Ayu Koes Indriyah mengangkat Staff (Kantor DPD RI Jakarta dan Kantor DPD RI Jawa Tengah) serta membentuk Koordinator Daerah (Korda) di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan dengan tujuan, yaitu :

- a) Aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat perlu diawasi dengan cara langsung dan memberikan respon
- b) Menginventarisir semua persoalan masyarakat yang menjadi tugas, pokok dan fungsi DPD RI.
- c) Melakukan komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan terhadap masyarakat untuk kemajuan masyarakat tersebut.

Mekanisme Penyelesaian Aspirasi dan Pembahasan

Setiap anggota DPD RI mempunyai tugas untuk menyelesaikan aspirasi yang datang dari masyarakat. Untuk itu dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan aspirasi yang datang dari masyarakat Jawa Tengah GKR Ayu Koes Indriyah melakukan bentuk Komunikasi sebagai berikut :

- a. **Komunikasi Administrasi (Data dan Fakta)**
Komunikasi Administrasi adalah berkaitan dengan surat menyurat, persoalan yang terjadi dalam masyarakat harus mempunyai data dan fakta secara tertulis.
- b. **Komunikasi struktural**
Komunikasi structural adalah mengkomunikasikan persoalan yang terjadi dimasyarakat dengan struktur kebijakan yang bertugas.
- c. **Komunikasi fungsional**
Komunikasi Fungsional ialah mengkomunikasikan persoalan kepada orang yang memegang bagian-bagian fungsi persoalan yang akan diselesaikan.
- d. **Komunikasi personal**
Komunikasi personal adalah menjalin komunikasi secara personal atau pendekatan kepada orang yang memegang peran tentang penyelesaian pokok persoalan yang akan disampaikan atau diselesaikan.
- e. **Komunikasi Politik**
Komunikasi Politik adalah melakukan komunikasi secara politik terhadap orang yang mempunyai kepentingan terhadap persoalan yang akan disampaikan.

GKR Ayu Koes Indriyah juga melakukan komunikasi dengan anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah lainnya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelembagaan serta dalam menampung dan menyelesaikan aspirasi yang datang dari masyarakat.

Konstituen GKR Ayu Koes Indriyah

Pemagian Konstituen

- a) **Kelompok Formal.**
Kelompok Formal ini adalah organisasi-organisasi pemerintah atau non pemerintah yang terdaftar secara hukum.
- b) **Kelompok Non Formal.**
Kelompok Non Formal adalah sekumpulan masyarakat yang membuat kumpulan-kumpulan tersendiri, misalnya kelompok tani, kelompok usaha, klub-klub seniman, olahraga dan lain sebagainya.

c) Kelompok Struktural.

Kelompok Struktural adalah kelompok masyarakat (pemuda, mahasiswa, dll) yang tergabung kedalam organisasi struktural yang mempunyai kepengurusan secara nasional.

d) Kelompok Kultural.

Kelompok Kultural adalah kelompok-kelompok paguyuban atau kedaearah yang mempunyai budaya, misalnya perkumpulan melayu, batak, jawa, dan sebagainya.

Dari kelompok konstituen yang telah dijelaskan diatas, GKR Ayu Koes Indriyah dalam berkomunikasi dengan konstituennya ada kelompok- kelompok yang menjadi prioritas utamanya, yaitu :

- a) Kelompok Seni, Adat, dan Agama
- b) Kelompok-Kelompok Tani
- c) Kelompok Pedagang
- d) Kelompok Pemuda dan Mahasiswa

Faktor Penghambat dan Pendukung Komunikasi Politik GKR Ayu Koes Indriyah terhadap konstituen

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh GKR Ayu Koes Indriyah dalam melakukan komunikasi politik terhadap konstituennya. Faktor Penghambat, yaitu :

1. Keterbatasan lembaga DPD RI yang tidak sama fungsi dan wewenangnya dengan lembaga DPR RI menjadi menghambat terhadap proses komunikasi politik. DPD RI kedepannya menjadi menyeimbang di legislatif, mempunyai kewenangan yang sama dengan DPR. Mudah-mudahan untuk hal ini kedepan adanya amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang lembaga DPD RI ini lebih lanjut.
2. GKR Ayu Koes Indriyah mempunyai hambatan dalam mensosialisasikan programnya, dikarenakan masih banyak atau belum seluruhnya masyarakat memahami apa itu lembaga DPD RI, karena lembaga ini lembaga yang baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
3. Minimnya anggaran untuk membantu langsung kegiatan partisipasi untuk masyarakat menjadi faktor penghambat GKR Ayu Koes Indriyah dalam menjalin komunikasi dengan konstituennya, serta kurangnya waktu untuk berada di daerah.

Faktor Pendukung, yaitu :

1. GKR Ayu Koes Indriyah menggunakan media cetak ataupun elektronik sebagai alat yang cocok untuk menyampaikan program-program DPD RI.
2. GKR Ayu Koes Indriyah diberikan fasilitas yang cukup khusus untuk melakukan kunjungan ke konstituen, sehingga beliau dapat melakukan hubungan silaturahmi secara berkelanjutan dengan konstituennya selagi masih berada di Jawa Tengah.
3. GKR Ayu Koes Indriyah memanfaatkan jaringan-jaringan yang sudah terbentuk dari dulu ketika dia aktif diberbagai macam pekerjaan dan organisasi, sehingga beliau mampu untuk melakukan komunikasi yang baik dengan konstituennya di Jawa Tengah.

KESIMPULAN

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh GKR Ayu Koes Indriyah (anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah) terhadap konstituennya yaitu melalui komunikasi langsung ketika melaksanakan kunjungan atau reses (Ceramah, Diskusi, dll), serta melakukan komunikasi dimedia cetak dan media elektronik Dalam menyelesaikan aspirasi yang datang dari konstituen GKR Ayu Koes Indriyah selalu berkomunikasi dengan stake holder yang

memegang kebijakan, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota DPD RI Jawa Tengah lainnya untuk menyelesaikan aspirasi yang datang dari konstituen. Dalam menampung aspirasi konstituen GKR Ayu Koes Indriyah menggunakan simbol komunikasi terbuka dengan semboyan Mider Deso Bangun Budi Pekertining Bangsa, serta memberdayakan Staf yang diangkatnya baik di Kantor Jakarta dan Semarang serta membentuk Koordinator Daerah. Untuk mengetahui konstituen, GKR Ayu Koes Indriyah mengelompokkan konstituen menurut kelompok dan golongannya, agar mudah berkoordinasi. Faktor pendukung dalam setiap kegiatan kunjungan atau reses yang dilakukan oleh GKR Ayu Koes Indriyah terletak pada terjalannya komunikasi yang efektif antar sesama staf dan korda serta konstituen, sehingga kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Faktor penghambat dalam berkomunikasi dengan konstituen ialah terletak pada kurang pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tugas dan wewenang DPD RI, sehingga apa yang disampaikan tidak sinkron terhadap tugas dan wewenang DPD RI itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2011.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana. Jakarta. 2008
- Buku Saku DPRD, *Seri Penguatan Legislatif, Membina Hubungan dengan Konstituen*, LGSP. Jakarta. 2009
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik (Konsep, Teori, dan Strategi)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2009.
- DPD/MPR, Kelompok. *Untuk Apa DPD RI/ Setjend DPD RI*. Jakarta. 2008.
- DPD RI, *Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2014-2019*. Setjend DPD RI. Jakarta. 2014.
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2004.
- NDI, *Hubungan dengan Konstituen. Panduan menuju praktek-praktek terbaik*. Jakarta, NDI. 2008
- Rousydi, Latihef. *Dasar-Dasar Rhetorica Komunikasi dan Informasi*. Firma Rimbow. Medan. 1989.
- Subardjo, *Dewan Perwakilan Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012.